

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Subsektor peternakan merupakan salah satu bagian dari sektor pertanian yang menyumbang pertumbuhan perekonomian nasional, hal ini dibuktikan dengan laju pertumbuhan yang selalu bernilai positif dan kontribusi yang cenderung meningkat (Ditjenak, 2013). Sektor peternakan di Indonesia telah memberikan peran yang cukup besar dalam perekonomian secara keseluruhan. Permintaan akan produk peternakan meningkat dari tahun ketahun sejalan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Pangan berupa produk peternakan adalah daging, susu dan telur yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (Susanti, 2015).

Peran subsektor peternakan artinya dalam menunjang perekonomian nasional, selain sebagai penopang dalam mensejahterakan masyarakat, keuntungan nyata yang dapat dirasakan langsung dari sub sektor peternakan ini antara lain sebagai penyedia lapangan kerja serta pendapatan dan sumber bahan pangan hewani bernilai tinggi khususnya protein. Hal tersebut senada dengan tujuan pembangunan subsektor peternakan yakni untuk meningkatkan produksi memenuhi konsumsi dalam negeri, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan devisa negara di sektor nonmigas, serta membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan peternak (Cepriadi, 2010).

Pengembangan subsektor peternakan sebagai bagian integral dari sektor pertanian perlu mendapat perhatian khusus dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya dan lingkungan yang ada. Hal ini karena kegiatan pada subsektor peternakan memiliki peran penting dalam peningkatan pendapatan petani, pemerataan perekonomian dan kesempatan kerja, serta perbaikan terhadap gizi masyarakat. Berdasarkan kementrian Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan produksi daging sapi Indonesia menurun dalam 2 tahun terakhir. Permintaan daging sapi yang tinggi merupakan peluang bagi usaha pengembangan sapi potong lokal sehingga upaya pengembangan ternak sapi potong berorientasi agribisnis dengan pola kemitraan merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan populasi sapi. Data produksi daging dalam negeri dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Produksi daging dalam negeri

No	Tahun	Produksi Daging Sapi (Ton)	Presentase (%)
1	2017	486.319	
2	2018	497.971	2,39
3	2019	504.802	1,37
4	2020	453.418	-10,18
5	2021	437.783	-3,44
<b>Rata-rata Penurunan Produksi</b>			<b>-2,46</b>

Sumber: Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2021.

Tabel 1 menunjukan produktivitas sapi potong menurun dalam 2 tahun terakhir sehingga produksi daging dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan karena populasi dan tingkat produktivitas ternak yang rendah. Rendahnya populasi sapi potong antara lain disebabkan sebagian besar ternak dipelihara oleh peternak berskala kecil dengan keterbatasan modal (Sugeng, 2007).

Pola Kemitraan adalah kerja sama antar pelaku agribisnis mulai dari proses praproduksi, produksi hingga pemasaran yang dilandasi oleh azas saling membutuhkan dan menguntungkan bagi pihak yang bermitra. Pemeliharaan sapi potong dengan pola seperti ini diharapkan dapat meningkatkan produksi daging sapi nasional yang hingga kini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat (Hafsah, 2000).

PT. Juang Jaya Abdi Alam merupakan salah satu industri peternakan sapi potong yang berkedudukan di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Saat ini perusahaan PT. Juang Jaya memiliki populasi sapi sebesar 14.805 ekor. Masalah yang dihadapi PT Juang Jaya Abdi Alam yaitu keterbatasan kandang serta perlu adanya tambahan biaya apabila terus memelihara sapi potong dalam keadaan bunting hingga proses melahirkan. Pada dasarnya PT Juang Jaya Abdi Alam merupakan perusahaan yang berfokus pada penggemukan sapi jantan. Sapi potong betina yang ada di PT Juang Jaya Abdi Alam merupakan kewajiban penerapan peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 49 tahun 2016 tentang pemasukan ternak ruminansia besar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Upaya menjaga kestabilan populasi sapi dalam negeri mewajibkan para importir atau pengusaha sapi bakalan dan siap potong (feedloter) membangun peternakan untuk pengembangbiakan atau *breeding* (Kementerian Perdagangan,

2016). Dijelaskan pada pasal 8 yang berisi Pasal 8 (1) Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, dan Kelompok Peternak yang melakukan Pemasukan Bakalan wajib memasukkan Indukan sebanyak 5% (lima persen) dari setiap Rekomendasi. (2) Indukan sebanyak 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikembangkan. (3) Kewajiban memasukkan Indukan sebanyak 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap selama masa berlaku Rekomendasi.

Kebijakan pola produksi pembiakan atau *breeding* ini berpengaruh pada *cashflow* usaha *feedloter*. Usaha penggemukan lebih cepat perputaran *cashflow* dibanding dengan usaha pembiakan yang membutuhkan jangka waktu relatif panjang untuk memperoleh keuntungan. Langkah integrasi program *breeding* ternak dapat dilakukan melalui pola kemitraan antara pihak perusahaan dan petani-ternak (Suharto, 2004). Kemitraan merupakan solusi *win-win* atau saling menguntungkan untuk kedua belah pihak yang terjalin dalam hubungan kemitraan yang akan mendukung pertumbuhan inklusif, memberdayakan peternak kecil, dan membentuk rantai nilai yang efisien. Untuk mencapai tujuan bersama, kemitraan mengimplementasikan beberapa aktivitas pada tingkat produksi untuk mendukung peternak dengan pengetahuan dan sumber daya. Peternak mitra dapat dijangkau oleh organisasi perodusen yang ada, atau didukung untuk membentuk organisasi produsen sendiri (Hartono, 2012).

Tabel 2. Daftar anggota mitra di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan

No	Kelompok ternak	Ketua Kelompok	Desa	Anggota	Populasi (ekor)
1	Permata Hijau	Asep Jumara	Budidaya	14	42
2	Rudam Berjasa	Tri Wahyudi	Way Gelam	12	23
3	Muncul Jaya	Supoyo	Candipuro	27	85
4	Tani Maju	Slamet	Siring Jaha	14	35
5	Karya Makmur	Supardi	Tanjung Bintang	7	31
6	Tani Makmur	Maryono	Palas	5	10
7	Lembu Makmur	Suprpto	Sidomulyo	14	38
9	Mitra Usaha	Mat Saleh	Bulog	5	10
10	Muda Karya	Sultan Arif	Sidomulyo Lama	7	14
11	Cinta Mulya	Supeno	Banjar Suri	3	4
12	Panca Bakti	Syamsuri	Patok	2	4
<b>Total</b>				<b>110</b>	<b>296</b>

Sumber: PT Juang Jaya Abdi Alam, 2022

Tabel 2 menjelaskan kondisi umum anggota peternak mitra PT Juang Jaya Abdi Alam terdapat 12 kelompok mitra dengan jumlah Petrenak mitra sebanyak 110 dan jumlah sapi sebanyak 296 ekor sapi. Kemitraan yang diterapkan di PT Juang Jaya Abdi Alam diharapkan mampu untuk mengatasi masalah keterbatasan kandang serta biaya tambahan untuk memelihara sapi bunting dari proses bunting sampai melahirkan, selain itu juga kemitraan dapat membantu peternak lokal dengan keterbatasan modal untuk memelihara sapi dan lemahnya ilmu pengetahuan dalam pemeliharaan sapi yang berdampak pada kesejahteraan dan peningkatan pendapatan masyarakat yang tergabung dalam hubungan kemitraan dengan PT Juang Jaya Abdi Alam.

Pola kerjasama yang dilakukan yaitu PT Juang Jaya Abdi Alam dengan peternak mitra yaitu peternak mitra mendapatkan saran produksi berupa sapi bunting dengan umur kebuntingan 7 bulan yang sebelumnya telah dilakukan pengecekan kebuntingan di PT Juang Jaya Abdi Alam, pasokan pakan konsentrat untuk menunjang produksi dan menjaga bobot tubuh sapi, bimbingan dan pelatihan. Bagi hasil 60% dari hasil pedet (anak sapi) serta fasilitas pengobatan gratis oleh petugas perusahaan sehingga dengan hal tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan peternak mitra saja, namun diharapkan juga dapat meningkatkan upaya mewujudkan swasembda daging sapi potong nasional.

Keuntungan yang diperoleh dari pihak PT Juang Jaya Abdi Alam yaitu berupa bagi hasil sebesar 40% dari hasil pedet (anak sapi) yang telah dilahirkan oleh induk sapi yang dipelihara oleh pihak peternak mitra. Selain itu juga dapat mengurangi biaya dalam proses pemeliharaan indukan sapi tersebut. Oleh karena itu, agribisnis sapi potong dengan pola kemitraan diharapkan mampu terus menguntungkan kedua belah pihak.

Berdasarkan masalah keterbatasan kandang untuk pemeliharaan sapi betina bunting maka PT Juang Jaya melaksanakan program kemitraan dengan peternak sekitar Kecamatan Sidomulyo, sehingga penulis tertarik mengangkat judul “Analisis Pola Kemitraan Peternakan Sapi Potong Antara Peternak Mitra dengan PT Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten Lampung Selatan” menjadi laporan TA yang dilakukan.

## 1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- a) Menjelaskan prosedur kemitraan antara peternak mitra dengan PT Juang Jaya Abdi Alam.
- b) Menganalisis pola kemitraan antara peternak mitra dengan PT Juang Jaya Abdi Alam.

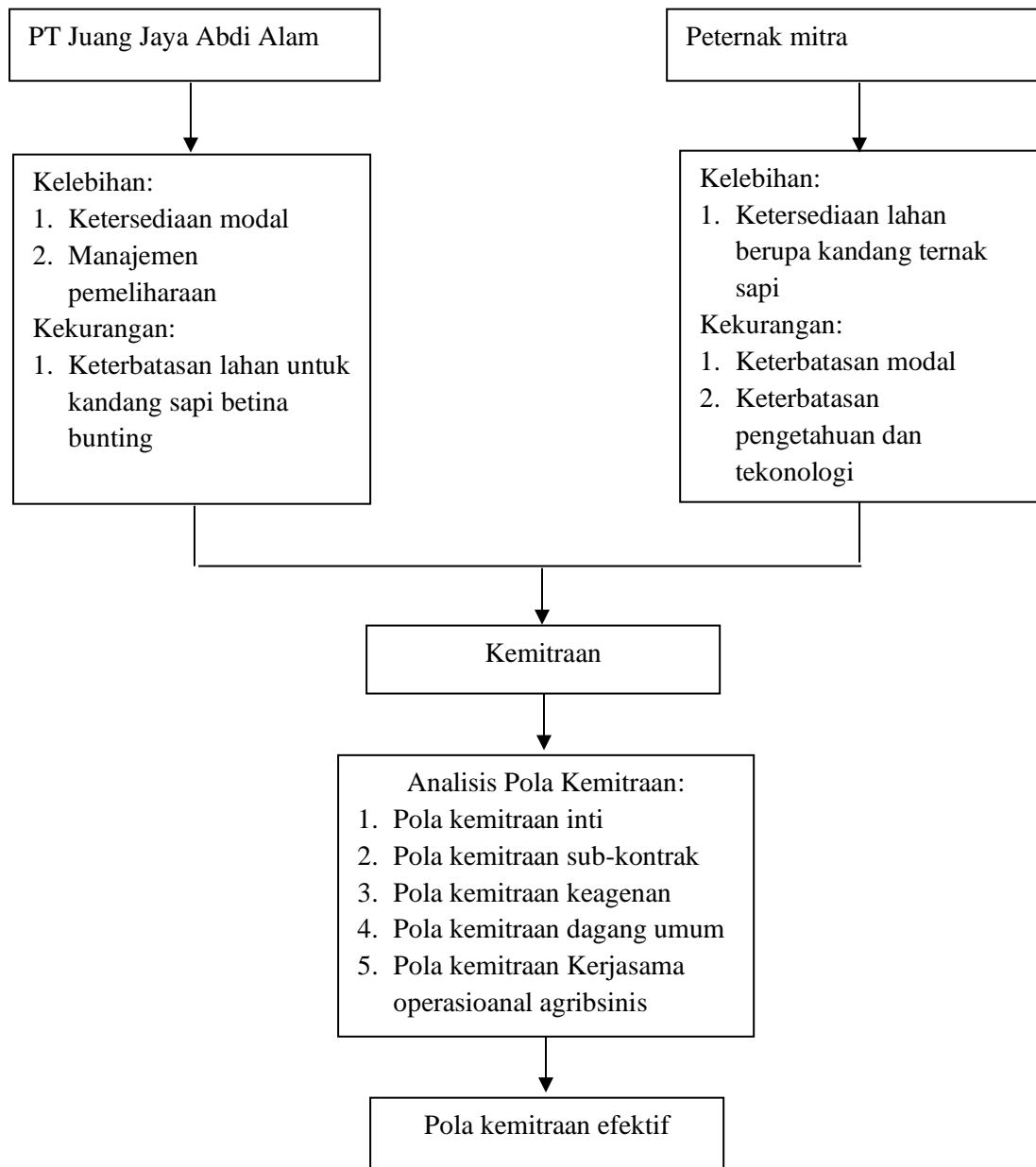
## 1.3 Kerangka Pemikiran

PT Juang Jaya Abdi Alam merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha utama dibidang penggemukan sapi potong secara intensif (*feedlot*), berdiri pada tahun 2001 dengan mendapatkan Surat Izin Usaha (SIU) secara resmi pada 15 Agustus 2001 dengan nomer Izin Usaha: C-05926 HT. 01.01.TH,2000. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bermodalkan dari dalam negeri atau penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sejak awal berdiiri sampai juni-juli tahun 2005 yang berfokus pada bidang penggemukan sapi potong secara intensif (*feedlot*). Pemodal tersebut berasal dari PT. Agro Giri Perkasa. Modal usaha PT. Juang Jaya Abdi Alam Tbk pada juli 2005 sampai sekarang berasal dari Negara Australia.

PT Juang Jaya Abdi alam berfokus pada penggemukan bukan pada perkembangbiakan sapi untuk itu pemeliharaan sapi yang dilakukan adalah sapi jantan, Hal ini disebabkan karena sapi jantan pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan sapi betina. Sapi betina yang ada di PT Juang Jaya Abdi Alam merupakan wujud penerapan dari peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 49 tahun 2016 tentang pemasukan ternak ruminansia besar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk menjaga kestabilan populasi sapi dalam negeri, Kementerian Perdagangan mewajibkan para importir atau pengusaha sapi bakalan dan siap potong (*feedloter*) membangun peternakan untuk pengembangbiakan atau *breeding* (Kementerian Perdagangan, 2016).

PT Juang Jaya Abdi Alam memiliki permasalahan keterbatasan kandang untuk pemeliharaan sapi bunting serta perlu adanya tambahan biaya apabila terus memelihara sapi potong dalam keadaan bunting hingga proses melahirkan. Kemitraan yang diterapkan di PT juang Jaya Abdi Alam diharapkan mampu untuk mengatasi masalah keterbatasan kandang serta biaya tambahan untuk memelihara

sapi bunting dari proses bunting sampai melahirkan, selain itu juga kemitraan dapat membantu peternak lokal dengan keterbatasan modal untuk memelihara sapi dan lemahnya ilmu pengetahuan dalam pemeliharaan sapi yang berdampak pada kesejahteraan dan peningkatan pendapatan masyarakat yang tergabung dalam hubungan kemitraan dengan PT Juang Jaya Abdi Alam, sehingga diharapkan kemitraan ini saling menguntungkan untuk kedua belah pihak (*mutual benefit*). Kerangka pemikiran analisis pola kemitraan sapi potong dengan PT Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka pemikiran analisis pola kemitraan sapi potong dengan PT Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten Lampung Selatan.

#### **1.4 Kontribusi**

Laporan tugas Akhir ini diharapkan mampu memberikan kontribusi, Yaitu:

- 1) Politeknik Negeri Lampung, diharapkan laporan tugas akhir ini dapat menjadi sumber dan referensi bacaan untuk akademisi peternakan dalam bidang Agribisnis.
- 2) PT Juang Jaya Abdi Alam, diharapkan laporan tugas akhir ini dapat memberikan masukan bagi perusahaan dalam hal kebijakan kemitraan sapi potong.
- 3) Pembaca, diharapkan laporan tugas akhir ini dapat menjadi bahan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta penerapan ilmu yang didapat selama masa kuliah dan praktik di lapangan.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Sapi Potong

Sapi potong adalah ternak yang dipelihara dengan tujuan utama sebagai penghasil daging atau sering disebut sebagai sapi pedaging. Sapi potong di Indonesia merupakan salah satu jenis ternak ruminansia yang terbesar memberikan andil terhadap kebutuhan daging. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, perbaikan taraf hidup, dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi sumber protein hewani. Sehingga, kebutuhan protein hewani termasuk daging sapi semakin meningkat.

Sapi potong adalah sapi yang dipelihara dengan tujuan utama sebagai penghasil daging, sehingga sering disebut sebagai sapi pedaging. Sapi potong di Indonesia merupakan salah satu jenis ternak yang menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan daging (Hastang dan Aslina 2014). Bangsa sapi potong yang saat ini ditemukan di Indonesia adalah sapi Peranakan Ongole (PO), sapi Bali, sapi Madura, sapi Brahman, sapi Limousin, sapi Simmental.

#### 1. Sapi Ongole

Sapi Peranakan Ongole (PO) merupakan hasil *grading up* sapi Jawadengan sapi Ogole yang berasal dari India yang dikembangkan di Pulau Sumba pada tahun 1930 dan membentuk sapi PO yang mendekati sapi Ongole murni. Sapi PO memiliki keunggulan sebagai sapi tropis yang mudah beradaptasi terhadap iklim tropis dan terhadap gangguan parasit, serta menunjukkan toleransi yang baik terhadap pakan yang tinggi terhadap serat kasaranya (Adinata, 2016).

#### 2. Sapi Simmental

Sapi Simmental memiliki ciri fisik badan berwarna merah bata, bentuk tubuh yang kekar dan berotot, bagian muka, perut, dan kaki berwarna putih. Sapi Simmental memiliki keunggulan yaitu pertumbuhan cepat, penambahan berat badan harian 0,9-1,2 kg, berat badan jantan umur 2 tahun mencapai 800-900 kg dan jantan dewasa mencapai 1000-1.200 kg, karkas tinggi dengan sedikit lemak, umumnya pejantan Simmental dapat berkembang baik hampir di seluruh Indonesia (Muada, 2017).

### 3. Sapi Limousin

Sapi Limousin memiliki ciri fisik badan kompak dan padat berwarna seluruhnya coklat muda, kuning agak kelabu (*beige*), kisaran warna gelap dan hitam. Sapi Limousin cocok di daerah dengan curah hujan yang tinggi dan jugadi daerah iklim sedang. Keunggulan pejantan Limousin memiliki pertumbuhan cepat dengan penambahan berat badan harian (PBBH) 1,0-1,4 kg, sedangkan umur 2 tahun beratnya mencapai 800-900 kg dan dewasa 1000-1.100 kg, dengan kualitas daging yang baik dan banyak disukai oleh peternak (Muada, 2017).

### 4. Sapi Bali

Sapi Bali merupakan salah satu jenis sapi lokal Indonesia yang berasal dari Bali. Sapi Bali memiliki keunggulan pertumbuhan yang cepat, mudah beradaptasi, dan penampilan reproduksi yang baik. Sapi Bali banyak dipelihara peternakan kecil karena fertilitasnya baik dan angka kematian yang rendah (Siswanto, 2013). Sapi Bali memiliki persentase karkas sebesar 54% (Wiyatna, 2007).

### 5. Sapi Madura

Sapi Madura adalah hasil persilangan antara sapi Bali dengan sapi Zebu. Sapi Bali sebagian lagi diduga antara banteng dengan campuran zebu (Sinhala) dan sapi tipe *short horn*, atau antara banteng dengan sapi lokal Jawa Tengah (Kutsiyah, 2012). Sapi Madura memiliki warna tubuh dominan coklat dan coklat merah. Warna moncong dan warna kuku Sapi Madura cenderung hitam. Sapi Madura memiliki garis muka yang lurus dan memiliki punuk kecil. (Setiadi dan Kusuma, 1998). Sapi Madura memiliki persentase karkas sebesar 47% (Wiyatna, 2007).

## 2.2 Kemitraan

Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1995). Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih

keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan (Hafsah, 2000).

Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis, keberhasilan kemitraan ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Dalam konteks ini pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam kemitraan tersebut harus memiliki dasar etika bisnis yang dipahami bersama dan dianut bersama sebagai titik tolak dalam menjalankan kemitraan (Hafsah, 2000). Hal ini erat kaitannya dengan peletakan dasar-dasar moral berbisnis bagi pelaku pelaku kemitraan. Penerapan dasar etika bisnis dalam kemitraan yang diwujudkan dengan tindakan nyata identik dengan membangun suatu fondasi untuk sebuah rumah atau bangunan (Soemardjo, 2009).

### **2.2.1 Tujuan kemitraan**

Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dibidang manajemen, produk, pemasaran, dan teknis, disamping agar bisa mandiri demi kelangsungan usahanya sehingga bisa melepaskan diri dari sifat ketergantungan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan (Hafsah, 2000) sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pendapatan kepada pihak-pihak yang bermitra.
- 2) Meningkatkan mutu dan keberlanjutan mulai dari penyedia input, proses hingga output yang dihasilkan.
- 3) Memberikan manfaat sosial
- 4) Mengembangkan kelembagaan program
- 5) Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

### **2.2.2 Manfaat kemitraan**

Manfaat yang dapat diperoleh bagi petani, perusahaan, dan pemerintah dengan adanya sistem pola kemitraan (Utami, 2015) adalah sebagai berikut:

a) Manfaat bagi petani

- 1) Adanya jaminan pemasaran hasil produksi yang pasti dengan harga yang layak sesuai dengan kesepakatan.

- 2) Petani dapat terbantu dari segi permodalan serta teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja usaha tersebut.
- b) Manfaat bagi perusahaan
- 1) Dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, maka efisiensi perusahaan dapat ditingkatkan dan pada akhirnya keuntungan perusahaan meningkat.
  - 2) Tersedianya bahan baku yang relatif cukup dari sumber mitra usahanya.
- c) Manfaat bagi pemerintah
- 1) Meningkatkan penerimaan negara sebagai dampak dari peningkatan pendapatan baik dari usaha ternak maupun dari perusahaan peternakan.
  - 2) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di pedesaan dengan berkembangnya usaha dan perusahaan baik usaha budidaya maupun agroindustri.

### **2.2.3 Unsur-unsur kemitraan**

Tiga unsur utama dalam kemitraan (Hafsah, 2000) adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur kerjasama antara usaha kecil di satu pihak dan usaha menengah atau usaha besar di lain pihak.
- 2) Unsur kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha menengah dan pengusaha besar.
- 3) Usaha saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

### **2.2.4 Prinsip-prinsip kemitraan**

Tiga prinsip penting dalam kemitraan (Wibisono, 2007), yaitu:

- 1) Kesetaraan (equity)

Pendekatannya bukan berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menguntungkan dan saling percaya. Untuk menghindari antagonism perlu dibangun rasa percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan.

- 2) Transparansi

Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan.

### 3) Saling menguntungkan

Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

#### **2.2.5 Peranan pelaku kemitraan**

Upaya dalam mewujudkan kemitraan usaha yang mampu memperdayakan ekonomi rakyat, sangat dibutuhkan adanya kejelasan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam kemitraan (Hafsah, 2000). Peran dari pelaku kemitraan usaha tersebut adalah sebagai berikut:

##### a) Peranan petani atau peternak

- 1) Melaksanakan ketentuan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.
- 2) Bersama-sama dengan perusahaan melakukan penyusunan rencana usaha untuk disepakati.
- 3) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam teknis usaha dan produksi.

##### a) Peranan perusahaan

- 1) Menyusun rencana usaha dengan mitra untuk disepakati.
- 2) Memberikan bimbingan dalam meningkatkan kualitas produk kepada mitra.
- 3) Menjamin pembelian hasil produksi sesuai dengan kesepakatan bersama.

#### **2.2.6 Prosedur kemitraan**

Kemampuan dalam melaksanakan kemitraan, tidaklah terwujud dengan sendirinya artinya harus dibangun dengan sadar dan terencana dimana pun berada melalui tahapan-tahapan yang sistematis. Tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan pelaku-pelaku usaha agar dapat bermitra (Hafsah, 2000):

- 1) Melakukan identifikasi dan pendekatan kepada pelaku usaha, baik pelaku usaha kecil, usaha menengah, maupun usaha besar. Tahap identifikasi ini terkait pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan jenis usaha atau komoditas yang akan diusahakan, potensi sumber daya yang mendukung, tingkat kemampuan para pelaku usaha baik di bidang pengusaha iptek, permodalan, sumber daya alam maupun sarana prasarana lainnya
- 2) Membentuk wadah organisasi ekonomi, untuk mempermudah dalam komunikasi, kelancaran informasi dan kemudahan koordinasi kemitraan usaha

antara pengusaha menengah atau besar dengan pengusaha kecil yang belum berbadan hukum dan dalam jumlah yang banyak maka perlu adanya pengorganisasian atau pengelompokan usaha kecil yang sejenis. Pengelompokan atau pengorganisasian ini bertujuan agar terbentuk skala ekonomi tertentu yang mempunyai aspek legalitas (berbadan hukum).

- 3) Menganalisis kebutuhan pelaku usaha, kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai peluang-peluang usaha dan permasalahan-permasalahan mendasar dalam pengembangan usaha yang dihadapi pelaku usaha kecil, usaha menengah ataupun usaha besar.
- 4) Merumuskan program, setelah permasalahan dan peluang-peluang usaha dianalisis, maka dapat disusun program yang dapat diaplikasikan dalam bentuk kegiatan seperti pelatihan, magang, studi banding, pemberian bimbingan serta peningkatan koordinasi lainnya.
- 5) Kesiapan bermitra, pelaku usaha kecil perlu menyadari bahwa kemitraan bukan belas kasihan dari pelaku usaha menengah atau pelaku usaha besar seperti dalam lembaga social yang bersifat cuma-cuma.
- 6) Temu usaha, kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan pelaku-pelaku usaha yang telah siap bermitra. Pada pertemuan ini kedua belah pihak mulai saling mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dari permasalahan yang dihadapi.
- 7) Adanya koordinasi, berkembangnya suatu kemitraan tidak terlepas dari adanya dukungan iklim yang kondusif untuk meningkatkan hasil produksi dan usahanya.

### **2.2.7 Pola kemitraan**

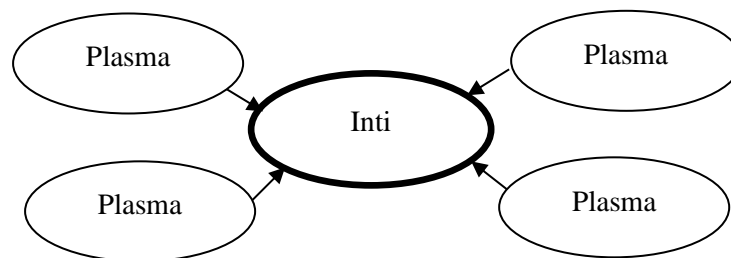
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang pedoman kemitraan usaha pertanian, pola kemitraan terdapat lima macam, yaitu:

#### 1) Pola kemitraan inti

Kemitraan inti plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dan perusahaan sebagai inti. Setiap pihak dalam bentuk kemitraan ini menyepakati berbagai hal (hak dan kewajiban) terkait dengan pelaksanaan kerjasama.

Perusahaan mitra bertindak sebagai inti memberikan pelayanan dalam bentuk pelayanan teknis, pemasaran hasil produksi, perhitungan laba rugi usaha, penyedia sarana produksi peternakan (Febriandika, 2017). Pelayanan ini juga sebagai media transfer teknologi dan informasi berkenaan dengan manajemen peternakan yang baik untuk memenuhi kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi.

Keunggulan sistem inti-plasma, antara lain terciptanya saling ketergantungan dan saling memperoleh keuntungan, adanya peningkatan usaha, dan dapat mendorong perkembangan ekonomi. Kelemahan pola kemitraan inti plasma, Pihak plasma masih kurang memahami hak dan kewajibannya sehingga kesepakatan yang telah ditetapkan berjalan kurang lancar, misalnya produk plasma sering tidak dijual ke perusahaan inti. Komitmen Perusahaan inti masih lemah dalam memenuhi fungsi dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang diharapkan plasma. Belum ada kontrak kemitraan yang menjamin hak dan kewajiban komoditas plasma sehingga kadang-kadang perusahaan inti mempermainkan harga komoditas plasma.



Gambar 2. Bagan Pola Kemitraan inti plasma

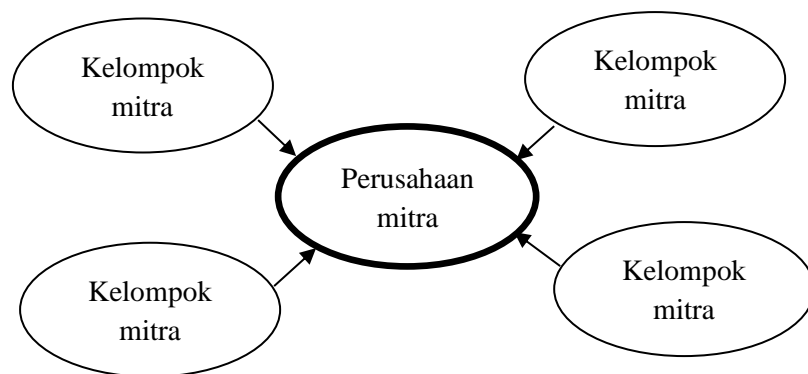
Sumber: Badan Agribisnis Departemen Pertanian Republik Indonesia, 1997

## 2) Pola kemitraan sub kontrak

Pola kemitraan sub kontrak merupakan pola kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya sedangkan perusahaan mitra berperan memberi kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi atau komponen, kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar, bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen,

perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan dan pembiayaan (Hafsah, 2000).

Kelebihan dari Pola Kemitraan Subkontrak, Bagi Kelompok mitra pemasaran produk cukup lancar. Terjadi transfer teknologi dan pengetahuan dari Perusahaan Mitra ke kelompok mitra. Kelemahan dalam pola kemitraan sub-kontrak, Asosiasi kelompok mitra yang terdiri dari beberapa usaha kecil perlu dikembangkan. Komponen-komponen kemitraan seperti pengembangan SDM, inovasi teknologi, manajemen, dan permodalan harus diperhatikan. Menumbuhkan rasa saling percaya antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra dan sesama anggota kelompok mitra (Soemardjo, 2004).



Gambar 3. Bagan pola kemitraan sub kontrak

Sumber: Badan Agribisnis Departemen Pertanian Republik Indonesia, 1997

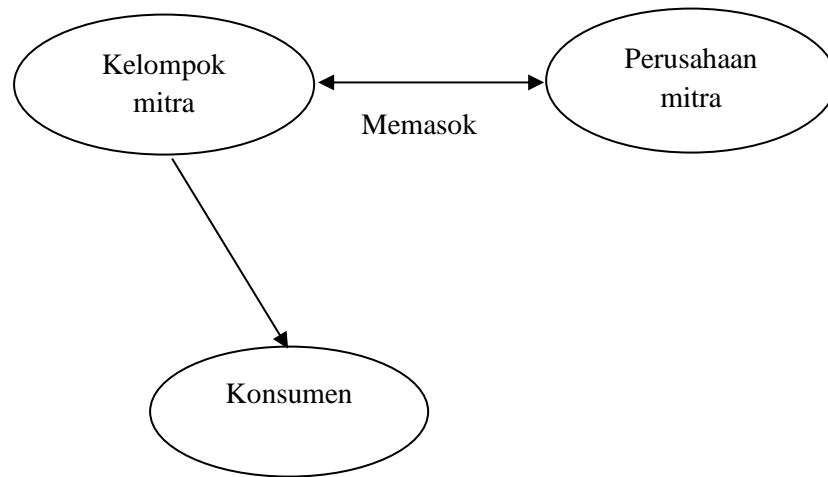
### 3) Pola kemitraan keagenan

Pola kemitraan keagenan merupakan bentuk kemitraan yang terdiri dari pihak perusahaan mitra dan kelompok mitra atau pengusaha kecil mitra. Pihak perusahaan mitra atau perusahaan besar memberikan hak khusus kepada kelompok mitra untuk memasarkan barang atau jasa perusahaan yang dipasok oleh perusahaan mitra. Perusahaan mitra bertanggung jawab atas mutu dan volume produk (Hafsah, 2000).

Keunggulan pola kemitraan keagenan memungkinkan dilaksanakan oleh para pengusaha kecil (Kelompok Mitra) yang kurang kuat modalnya karena biasanya menggunakan sistem mirip konsinyasi. Kelemahan pola kemitraan keagenan yang sering terjadi di lapangan, Kelompok Mitra menetapkan harga produk secara sepihak, sehingga harga menjadi tinggi di tingkat konsumen. Kelompok Mitra



sering memasarkan produk dari beberapa Perusahaan Mitra, sehingga kurang mampu membaca segmen pasar dan tidak memenuhi target.



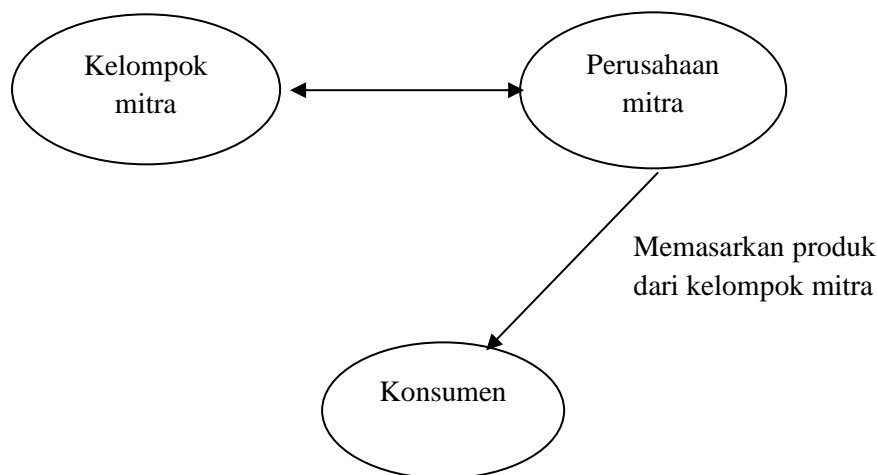
Gambar 4. Pola kemitraan keagenan

Sumber: Badan Agribisnis Departemen Pertanian Republik Indonesia, 1997

#### 4) Pola kemitraan dagang umum

Pola kemitraan dagang umum merupakan pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk memenuhi atau mensuplai kebutuhannya harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan mitra usaha. Keuntungan pola kemitraan dagang umum ini adalah adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan dan kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan atau disepakati bersama. Kelemahan dari pola ini adalah memerlukan permodalan yang kuat sebagai modal kerja dalam menjalankan usaha baik oleh kelompok mitra usaha maupun perusahaan mitra usaha (Hafsah, 2000).

Keunggulan pola kemitraan dagang umum, kelompok mitra tidak perlu bersusah payah memasarkan hasil produknya sampai ke tangan konsumen karena sudah dijamin oleh perusahaan mitra. Kelemahan pola kemitraan dagang umum adalah dalam praktiknya, harga dan volume produknya sering ditentukan sepihak oleh Pengusaha Mitra, sehingga merugikan pihak Kelompok Mitra. Selain itu, sistem perdagangan dalam pola kemitraan dagang umum sering kali ditemukan berubah menjadi bentuk konsinyasi (Hafsah, 2000).



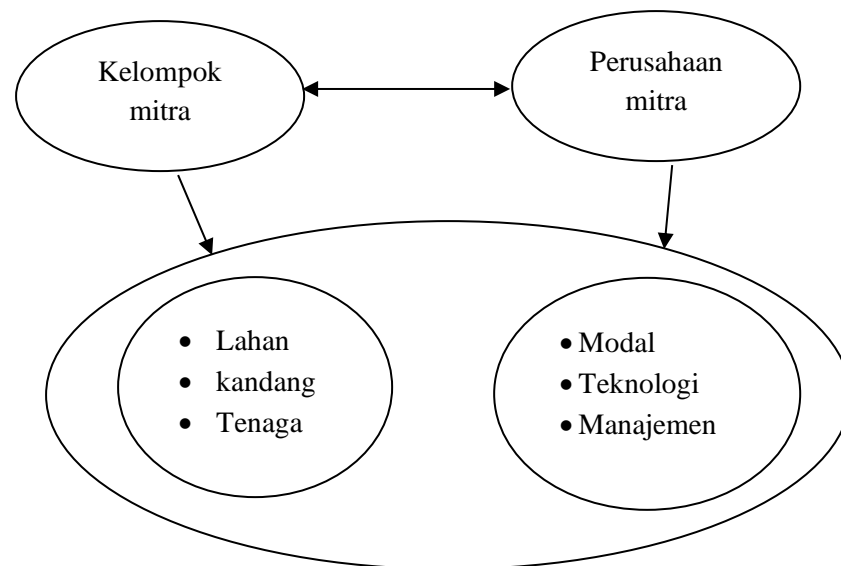
Gambar 5. Pola kemitraan dagang umum

Sumber: Badan Agribisnis Departemen Pertanian Republik Indonesia, 1997

#### 5) Pola kemitraan kerjasama Operasional agribisnis (KOA)

Berdasarkan surat keputusan menteri pertanian mengenai pedoman kemitraan usaha pertanian No.940/Kpts/OT.210/10/1997 pola kemitraan kerjasama Operasional agribisnis (KOA) merupakan pola hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dan perusahaan mitra yang di dalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan modal, sarana dan bimbingan untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian.

Keunggulan pola kemitraan KOA ini sama dengan keunggulan sistem Inti-Plasma. Pola ini banyak ditemukan pada masyarakat pedesaan antara usaha kecil di desa dengan usaha rumah tangga dalam bentuk bagi hasil. Kelemahan dalam pola kemitraan KOA, antara lain: Pengambilan untung oleh perusahaan mitra yang menangani aspek pemasaran dan pengolahan produk terlalu besar, sehingga dirasakan kurang adil oleh kelompok usaha kecil mitranya. Perusahaan Mitra cenderung monopsoni sehingga memperkecil keuntungan yang diperoleh perusahaan kecil mitranya. Belum ada pihak ketiga yang berperan efektif dalam memecahkan permasalahannya.



Gambar 6. Pola Kemitraan Kerjasama Operasional Agribisnis

Sumber: Badan Agribisnis Departemen Pertanian Republik Indonesia, 1997